

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PINRANG) TAHUN 2020**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PINRANG) TAHUN 2020**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAHMA NURHIKMA
NIM: 105721126518

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2022**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang) Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Rahma Nurhikma

No. Stambuk/ NIM : 105721126518

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1444 H

20 Agustus 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Muttalib, SE., MM
NIDN: 0901125901

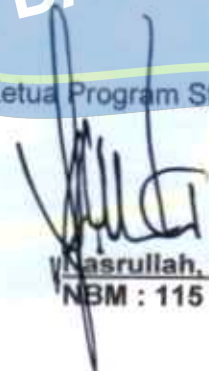

Nurma, SE., MM
NIDN: 0930088503

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi Manajemen


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507


Nasrullah, S.E., M.M
NBM : 115 1132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Rosmini, NIM:105721126318 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0019/SK-Y/61201/091004/2022 M, Pada tanggal 22 Muharram 1444 H / 20 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 22 Muharram 1443 H
20 Agustus 2022 M.

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji
 1. Abdul Muttalib, SE.,MM
 2. Alamsjah, SE.,MM
 3. Zalkha Soraya, SE.,MM
 4. A. Tenti Syahrani, S.pd, M.M

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahma Nurhikma

Stambuk : 105721126518

Program Studi : Manajemen

Judul Skripsi : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2020

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli HASIL karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Agustus 2022 M

buat pernyataan,



Rahma Nurhikma

NIM: 105721126518

Mengetahui,

Ketua program Studi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Nasrullah, SE., MM
NBM : 115 1132

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Nurhikma
NIM : 105721126518
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

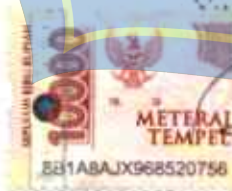
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG) TAHUN 2020**

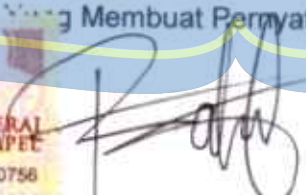
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,




Rahma Nurhikma
NIM: 105721126518

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pinrang) Tahun 2020", dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Akkas dan Ibu Sunarti, yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Nurlina SE, M.M, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Ibu Amelia Rezki Septiani, SE, MM selaku Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh Pegawai DPMTSP Kabupaten Pinrang yang telah membantu penulis mengumpulkan data selama penelitian.
10. Teman-teman MAN 18G Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
11. Terkhusus peneliti ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Time, Tika, Sari, Aswan, Hasrul, Callu, Joko yang telah memberikan motivasi dan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini.

12. Terima kasih teruntuk semua rekan, sahabat dan saudara yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nashrun min Allahu wa Fathun Karim, Billahi fil Sabilil Haq, Fastabiqul Kheirat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar,

2022

Rahma Nurikma

ABSTRAK

RAHMA NURHIKMA. 2022. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang) Tahun 2020. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Abdul Muttalib dan Nurlina

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, penelitian lapangan dan studi internet.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dikatakan efektif namun belum efisien dikarenakan yang terealisasi lebih tinggi daripada yang dianggarkan. (2) Anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan baik, sesuai dengan target kinerja yang terealisasi dengan baik sehingga anggaran berbasis kinerja dapat dikatakan efektif.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja.

ABSTRACT

Rahma Nurhikma, 2022. Analysis of Performance-Based Income and Ependiture Budgets (Case Studies of the One-Stop Investment and Service Pinrang districy) Tahun 2002. Thesis. Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Accompanied by: Abdul Muttalib and Nurlina

This study aims to determine the performance-based income and expenditure budget at the Investment and One-Stop Integrated Service Office Of Pinrang Regency in 2020. This research is a type of qualitative research because qualitative research uses descriptive methods and tends to use a deductive approach to analysis. Data collections is done by library techniques, field research and internet studies.

The results of the research obtained by the author it can be concluded that (1) the implementation of the budget at the investment office and one-stop integrated service in the Pinrang Regency based on the Budget Realization Report (LRA) can be said to be efficient but not yet effective because the realization is higher than the budgeted. (2) performance-based budgeting at the one-stop investment and service department of Pinrang in accordance with the performance targets that have been realized properly so that performance-based budgeting can be said to be effective.

Keywords: Budget Analysis and Performance Based Expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Pengertian dan Fungsi Anggaran	8
2. Anggaran Berbasis Kinerja	12
3. Laporan Realisasi Anggaran.....	13
4. Pendapatan Asli Daerah	15
5. Value For Money	16
B. Tinjauan Empiris	18
C. Kerangka Konsep.....	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Fokus Penelitian.....	24
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
D. Sumber Data	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	25
F. Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	27
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2019	9
Tabel 2.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2019.....	15
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.2 Struktur LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020	51
Tabel 4.3 Uraian Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.....	52
Tabel 4.4 Analisis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kegiatan surat menyurat Tahun 2020	52
Tabel 4.5 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2020	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Konsep 22

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pinrang 33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah organisasi yang mengatur kepentingan Bangsa dan Negara dalam rangka untuk mencapai tujuan negara dan untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan untuk menjalankan aturan yang telah disepakati, pemerintah juga harus mampu menyediakan layanan guna untuk meningkatkan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran kegiatan.

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Makka, et.al., 2015, anggaran merupakan salah satu komponen dalam melaksanakan suatu program ataupun kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan, harus ada perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Dengan adanya bantuan anggaran dalam manajemen kita dapat menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi untuk membandingkan anggaran dengan hasil aktual, sehingga dapat mencapai seberapa besar penggunaan anggaran dalam mencapai penilaian kinerja dengan tujuan untuk memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. Anggaran dan Realisasi memberikan gambaran tentang penganggaran dan pendanaan selama satu tahun terakhir. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan

daerah. Anggaran berperan penting sebagai sarana pemantapan, pengalokasian sumber daya publik, perencanaan organisasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

Halim dan Iqbal (2012:173) mengartikan anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, sehingga semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga di dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Nordiawan, dkk (2007), "APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah". Sementara menurut Ramadani (2017), APBD dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah yang mendeskripsikan mengenai perkiraan pengeluaran yang sebesar-besarnya dalam belanja kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun serta dapat menggambarkan estimasi pendapatan dan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk menutupi biaya. APBD terdiri dari atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-Undang No. 1 tentang Perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyampaian kepada daerah atas rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Indonesia telah menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai pengganti dari penganggaran tradisional sehingga anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dari penganggaran sektor publik, yang pada dasarnya dilatarbelakangi atas berbagai persoalan mendasar yang terdapat dalam sistem pendekatan tradisional, sehingga tidak ada perhatian ekonomis, efisien terhadap pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Penerapan penganggaran berbasis kinerja mencantumkan indikator dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran untuk penyusunan anggaran pemerintah sehingga pengembangan pada indikator kinerja dapat menekankan pada *outcome*. Sistem penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak dipakai oleh negara-negara maju di dunia sebagai pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem Line Item Budgeting. Tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan dengan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

- 1) Gaya kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi,

- 2) Penyempurnaan sistem administrasi secara terus menerus,
- 3) Sumber daya yang cukup,
- 4) Penghargaan (reward) yang jelas, dan
- 5) Sanksi (punishment) yang tegas.

Untuk membuat anggaran pendapatan belanja daerah berbasis kinerja pemerintah daerah harus memiliki perencanaan strategic (Renstra). Renstra disusun secara objektif dan melibatkan seluruh sektor pemerintahan. Melalui sistem ini, pemerintah daerah akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu aspek yang diukur dan evaluasi kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). Anggaran berbasis kinerja menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat ukur kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

Pencapaian indikator kinerja haruslah mendukung pencapaian dan keberhasilan dari suatu sasaran strategis dan sasaran instansi pemerintah yang tertuang dalam mekanisme RKA-KL (Rencana Kerja Kementerian Kelembagaan) untuk dapat mengaitkan tujuan yang ingin dicapai untuk dicantumkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh satuan kerja.

Penerapan sistem anggaran berbasis Kinerja merupakan sebuah peluang bagi pemerintah namun disisi lain dapat menjadi tantangan. Hal itu dikarenakan dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berarti pemerintah daerah dapat menyusun arah, kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan daerah tersebut. Konsep anggaran berbasisi kinerja telah diterapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang. Kegiatan perencanaan serta penganggaran harus melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kerja dan target kinerja sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan.

Kondisi sekarang ini masih ada satuan kerja yang menyusun aturam anggaran lebih memberikan perhatian kepada *input* (*input based*). Begitu pula halnya pada saat pelaksanaan anggaran masih terdapat satker yang berpikir bagaimana menghabiskan anggaran yang tersedia lebih menjadi tujuan daripada pencapaian target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen anggaran. Segala upaya dilakukan untuk menghabiskan dana yang tersedia dalam anggaran & dana yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terutama pada akhir tahun anggaran, masih merupakan fenomena yang sering ditemukan hampir pada semua instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Namun, kondisi ini belum menyentuh masalah penggunaan indikator kinerja pada dokumen anggaran. Sehingga, dalam pengelolaan keuangan pada instansi DPMPTSP Kabupaten Pinrang, yakni sering terjadi sisa anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa pemerintah wilayah telah memutuskan prediksi yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh anggaran belanja. Dalam Laporan Anggaran bisa saja surplus, yakni pendapatan yang terealisasi lebih besar dari pada target kinerja ataupun target kinerja lebih besar daripada yang terealisasi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi dalam

perencanaan keuangan berbeda dengan yang terealisasi dalam pelaksanaan anggaran.

Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang harus dapat mengatur pengelolaan keuangannya dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pengelolaan dalam merealisasikan laporan anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang merupakan salah satu unsur pendukung yang mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal dan perizinan, serta berdasarkan visi DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri dan tangguh mengelola potensi daerah, sehingga peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian dan fungsi Anggaran

Anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Jadi secara umum anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (suatu jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang disusun secara sistematis untuk dilaksanakan oleh manajemen dalam satu periode tertentu secara kuantitatif. Anggaran digunakan oleh suatu perusahaan untuk digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Nordiawan dan Hertianti (2010), menyatakan anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dari pengertian anggaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka anggaran terdiri dari 4 unsur yaitu: (1) Rencana, (2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, (3) Satuan moneter, dan (4) jangka waktu tertentu yang akan datang.

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan bagi masyarakat. Contohnya pidato presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian untuk tahun berikutnya. Sehingga APBN menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah maupun pihak oposisi. Sehingga dilakukan penetapan target indikator pada instansi pemerintah. Tujuan dilakukannya indikator ini sebagai gambaran untuk memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	100%
2.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Rp1.020.259.289,137
3.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Asing (PMA-US\$)	\$39.411.359,18

Sumber : Rencana strategis DPMPSTP Kab.Pinrang 2019

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dari arti kata asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan, karena keterbatasan suatu sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini adalah dana, sehingga diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam ruang lingkup fungsi anggaran dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

a) Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan. Anggaran dalam sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

b) Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran dikatakan sebagai alat pengendalian merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan dan melaksanakan proses perencanaan dan fungsi pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c) Anggaran sebagai alat politik

Anggaran ini digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pembuatan anggaran publik membutuhkan *political will*, *coalition building*, *keahlian*

berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

d) Anggaran adalah alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Anggaran juga merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian.

e) Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sasongko dan Parulian (2015), fungsi anggaran dalam manajemen terdiri dari 5 fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil dari perundingan antara anggota organisasi yang dominan, yang menunjukkan persetujuan organisasi mengenai tujuan-tujuan operasi untuk masa depan.
- b) Anggaran merupakan *blueprint* bagi perusahaan untuk bertindak yang menggambarkan prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber daya dan menunjukkan bagaimana bagian organisasi diharapkan bekerja dalam mencapai keseluruhan tujuan perusahaan.
- c) Anggaran bertindak sebagai alat komunikasi interna yang menghubungkan berbagai departemen atau divisi dalam organisasi.
- d) Anggaran berusaha memengaruhi dan memotivasi manajer untuk bertindak efektif dan efisien.

- e) Anggaran sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjukkan area dimana kekuatan dan kelemahan perusahaan.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu metode dalam penganggaran manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Menurut Bastian (2006) anggaran kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Anggaran berbasis kinerja merupakan instrumen kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan anggaran untuk mencapai sasaran dan tujuan untuk memperoleh alokasi anggaran yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah yang disusun dengan mengarah kepada 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis).

Konsep anggaran berbasis kinerja telah lama menjadi reformasi pengelolaan keuangan dalam berbagai instansi pemerintahan. Namun pada kenyataannya anggaran berbasis kinerja ini masih belum maksimal dan belum tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini ada. Anggaran dan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Rencana Kerja (Renja)

dimana setiap unit kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

3. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan berbagai sumber kegiatan dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan yang diusulkan untuk membiayai belanja daerah. Laporan anggaran menyajikan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah penerimaan entitas pemerintah melalui bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pada setiap tahun anggaran.

b) Belanja

Belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang pembayarannya tidak perlu diperoleh kembali oleh pemerintah. Belanja daerah terdiri dari 3 yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik.

2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Sarana dan Prasarana Publik)

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas/pelayanan publik.

3. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

c) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dana kepada entitas yang lain dan perimbangan dananya akan bagi hasil.

d) Pembiayaan (*Financing*)

Financing adalah penerimaan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, namun penerimaannya berasal dari pinjaman dan hasil dari investasi sedangkan pengeluarannya digunakan sebagai pembayaran pokok pinjaman, sehingga dalam laporan realisasi anggaran dapat menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan tersebut.

Realisasi Perjanjian kinerja pada DPMPTSP dilakukan sebagai pencapaian yang memiliki sasaran dan realisasi perjanjian kinerja pada SKPD sebagai hasil pencapaian yang maksimal atas adanya realisasi perjanjian kinerja. Pada tabel berikut dapat dilihat Realisasi Capaian Indikator Kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019.

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja pada DPMPSTSP Kabupaten Pinrang
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1. Nilai Sakip "B"	72%	68,49%	95%
		2. Nilai persentase penerbitan perizinan sesuai SOP	100%	95%	96%
2.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	1. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rp1.020.259.289.317,00	Rp1.729.696.956.063,00	170%
		2. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA- US\$)			

Sumber: Rencana strategis DPMPSTSP Kab.Pinrang 2019

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah yang sumber sumber pendapatannya berasal dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah. Pendapatan daerah sebagai sektor peranan yang sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah memberikan tujuan tersendiri sebagai pelaksanaan otonom daerah agar terwujudnya desentralisasi dalam potensi daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah juga dipengaruhi dari berbagai sumber keuangan yang menghasilkan pendapatan bagi daerah sehingga meminimalkan ketergantungan bantuan pendanaan dari pusat. Menurut Sebastian dan Cahyo (2016), "semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam memenuhi

kebutuhan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dan menghasilkan potensi-potensi yang optimal jika daerah mampu mengelola dengan baik",

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar, tetapi semakin besar komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar.

5. *Value for Money*

Value for money adalah konsep pengukuran kinerja yang memberikan informasi terhadap anggaran atau dana yang segala unsurnya berbentuk satu kesatuan dari input, output, dan income. Menurut Mahmudi (2013:83) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisien, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* memberikan informasi terhadap fungsi-fungsi akuntabilitas untuk mendorong tanggungjawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Indikator kinerja memberikan manfaat kepada pihak internal maupun pihak eksternal dalam memberikan informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Dalam organisasi publik konsep *value for money* di dasarkan pada 3 elemen utama yaitu sebagai berikut:

a) Ekonomi

Ekonomi dinyatakan dalam satuan moneter yang dimana merupakan perbandingan input dengan input value. Ekonomi juga merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas untuk menentukan harga terendah, input dalam sumber daya alam digunakan untuk pelaksanaan kebijakan, program, maupun aktivitas.

b) Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja value for money dalam efisiensi dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Efisiensi alokasi yaitu terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
- 2) Efisiensi teknis atau manajerial yaitu terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

c) Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat pencapaian dari hasil program dengan target yang telah ditetapkan yang pada dasarnya merupakan perbandingan dari *outcome* dan *output*. Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Biasanya penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Marno Wance (2019)	Dinamika Perencanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan	Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penyusunan rancangan APBD yang ditetapkan sebagai rencana strategis yang berkaitan dengan bidang keuangan
2.	Leonardo Yosua Liando (2017)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan Kolongan sudah cukup baik dan teah sesuai UU No. 6 Tahun 2014

3.	Yetti Afrida Indra (2019)	Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berkas Kinerja Di SKPD Provinsi Bengkulu	Metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan seberapa besar presentase variasi dalam variabel yang Diperlukan
4.	Murni Dahlena & Junita Putri Rajana (2020)	Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Utara	Analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukka bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah baik dan mandiri ditandai dengan besarnya komponen pendapatan asli daerah
5.	I Putu Dharmanu Yudhartha (2019)	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, Kabupaten Bangli Kecamatan Kintamani	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Kabupaten Bangli belum mencerminkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja

6.	Nikoleta Sabubun (2020)	Analisis Efektifitas Dan Efisien Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Metode deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah kurang efektif karena yang ditargetkan lebih besar dari Realisasi
7.	Ketut Winaya (2017)	Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi struktur analisis struktur anggaran pendapatan belanja desa belum mencerminkan anggaran pendapatan dan belanja yang berbasis kinerja
8.	Ova Danila & Syukury Abdullah (2018)	Analisis Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Di Kabupaten BenerMeriah, Aceh	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, sistem teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan penghargaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja

9.	Fitriani & Armin Arsyad (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa factor kurang pemahaman aparat dan ketersediaan fasilitas pendukung sangat mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja
10.	Dendy Syailul Akbar (2018)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Metode deskriptif	Hasil penelitian dan pengelolaan data menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada balai pengelolaan jalan dengan besarnya pengaruh sebesar 56% sedangkan sisanya 44% dipengaruhi factor lain

C. Kerangka Konsep

Setiap institusi pemerintahan dalam hal menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun berdasarkan aspek manajemen dalam rangka efektivitas dan efisien anggaran untuk dapat mengoptimalisasikan anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja. Secara jelas dapat dilihat skema kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.4

Kerangka Konsep

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pinrang

Rencana
Kerja

Target
Kinerja

Penetapan
Anggaran

Realisasi
anggaran



Untuk mengelola suatu keuangan daerah diperlukan adanya tahapan kebijakan salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan yang baik untuk mewujudkan tata keuangan realisasi anggaran yang efisien. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja keuangan untuk mempertanggungjawabkan laporan realisasi anggaran setiap akhir tahun.

Tingkat keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Penetapan anggaran pendapatan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pada laporan realisasi anggaran. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja dan pengimplementasiannya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat akan berpengaruh pada pendapatan perkapita yang meningkat, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang meningkat dan distribusi anggaran pendapatan yang merata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang menguraikan informasi kualitatif sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini sering digunakan untuk menganalisis aktivitas dan fenomena sosial yang ada di lingkungan yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari data keuangan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Fokus penelitian adalah pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dalam memecahkan masalah sehingga yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah menganalisis hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Jl. Jend. Sukawati. Adapun waktu penelitian selama 2 bulan dari bulan Mei hingga bulan Juli

D. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, merupakan pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis data, informasi yang terdapat pada laporan atau dokumen yang tersedia, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data laporan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan menempuh cara berikut:
 - a. Observasi, dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
 - b. Dokumentasi, pengumpulan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berupa data-data laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja.

c. Wawancara, Tanya Jawab yang dilakukan oleh beberapa pegawai yang menangani masalah laporan keuangan.

2. Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca atau mempelajari buku literature lainnya yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Mengenai metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Pengambilan kesimpulan dan konfirmasi

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan meninjau semua catatan laporan yang di diperoleh dari hasil observasi, dan dokumentasi secara keseluruhan yang dirangkum. Peneliti akan merangkum dan kemudian memilih poin-poin data penting yang didapatkan di sekitar dinas tersebut dari hasil pengamatan yang dilakukan. Peneliti akan menyusun data secara konsisten, sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran secara nyata dan memudahkan peneliti dalam mencari data jika diperlukan.

Dari berbagai metode analisis data yang ada, peneliti akan menerapkan beberapa langkah untuk mengkaji data tersebut antara lain:

1. Mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian
2. Melakukan pengamatan secara intensif
3. Melakukan verifikasi setiap data yang ditambahkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Latar Belakang Terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang

Pada awalnya, Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk dalam sebuah organisasi SKPD berbentuk kantor yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pinrang. KP2T memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan PTSP sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008. Pada tanggal 4 Juni 2010, Bupati Pinrang melakukan pengisian jabatan struktural dan melantik Dra. Hj. A. Nurhayati Tamma, M.Si sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sejak pelantikan pejabat struktural, KP2T melakukan tahap persiapan untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi: rapat penetapan SKPD Teknis, studi banding ke beberapa Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PTSP, dan penyusunan dokumen pendukung lainnya. Melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang, Bupati Pinrang melakukan pendelegasian kewenangan 36 perizinan. Sejak tanggal 1 Juli 2010, KP2T resmi

sebagai Pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kabupaten Pinrang.

Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal, maka DPMPSTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhanaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPSTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan penataan ulang serta tata kelola perizinan dan penanaman modal dengan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.

Adapun tugas pokok DPMPSTSP adalah melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mempunyai tugas koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPSTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program Dinas.
2. Pelaksanaan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum.
3. Ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan.
4. Pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang penanaman modal.
5. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah.
6. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
7. Pemetaan peta penanaman modal di daerah.
8. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal asing di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
9. Pelaksanaan promosi penanaman modal di daerah.
10. Pengembangan sektor usaha penanaman modal di daerah.
11. Pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di daerah.
12. Penyelenggaraan PPTSP di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha.
13. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.
14. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.

15. Pelaksanaan PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hak substitusi.
16. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi.
17. Pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pengaduan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

1. Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri dan tangguh mengelola potensi daerah

2. Misi :

- a) Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
- b) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

3. Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Adapun struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

BADAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP-TSP) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR 48 TAHUN 2018 NOMOR 48 TAHUN 2018



Uraian tugas struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang:

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok untuk memimpin badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas.

2) Bagian Sekretariat

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi SOP
- c. Membantu kepala dinas merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Melaksanakan Survey Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

- h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- i. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

3) Sub Bagian Program

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi SOP
- c. Membantu kepala dinas merumuskan misi dan visi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja)

dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- d. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SPM) di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- i. Mengikuti rapat-rapa sesuai dengan bidang tugasnya
- j. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi yang menyangkut perencanaan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- m. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya
- n. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, dan

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum, kepegawaian, dan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan SOP
- c. Membantu kepala dinas merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Dinas, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Membantu kepala dinas menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi tugas dalam lingkungan sub bagian umum, kepegawaian, dan hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- h. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya
- i. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar
- j. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas

- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan baran inventaris
 - m. Mengoordinasiakn dan melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi
 - n. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan
 - o. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai
 - p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai
 - q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan dinas
 - r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara
 - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian, dan hukum, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- 5) Kepala Sub Bagian Keuangan**
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi SOP

- c. Membantu kepala dinas merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SPM) di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Membantu kepala dinas menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau merandatangani naskah dinas
- i. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas
- j. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dinas

bahan, sarana, prasarana, dan publikasi promosi penanaman modal

m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal daerah

n. Menilai prestasi kerja staff dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir

7) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi

a. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang Pengolah data dan sistem informasi

b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas di lingkup bidang pengolahan data dan sistem informasi

c. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang data dan sistem informasi penanaman modal

d. Mengkoordinasikan pengelolaan kearsipan perizinan dan non perizinan

e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan perizinan dan non perizinan

f. Memverifikasi dan mempromosikan penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (RITIK) dinas

g. Memeriksa dan meneliti pelaksanaan pembangunan sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan

- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- k. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya

9) Bidang Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pengaduan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas di lingkup bidang pengaduan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- c. Menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengaduan layanan perizinan dan non perizinan di unit PTSP
- d. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah meliputi peraturan daerah dan peraturan bupati
- e. Memverifikasi dan mempromosikan kebijakan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah
- f. Memeriksa dan meneliti tindak lanjut pengaduan perizinan dan non perizinan di unit PTSP
- g. Mengkoordinasikan pemberian advokasi layanan perizinan dan non perizinan dalam menyelesaikan permasalahan perizinan dan non perizinan di unit PTSP

- h. Memeriksa dan meneliti konsep kebijakan pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah pengembangan penanaman modal secara berkala (triwulanan dan semesteran)
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumuman kewajiban perusahaan penanaman modal dan pemberian penghargaan kepada perusahaan PMA dan PMDN
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan **workshop** Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada perusahaan penanaman modal
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan, dan advokasi layanan
- o. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya

Kelautan dan Perikanan RI).

Sedangkan belanja pada tahun 2020 yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa termasuk dalam posbelanja operasi, kemudian belanja modal dan peralatan mesin dan belanja modal gendung dan bangunan terdiri dari belanja modal. Berikut penjelasan pos belanja:

1. Belanja pegawai merupakan dana yang dikeluarkan untuk gaji dan tunjangan pegawai tetap, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi daerah. Belanja pegawai yang ditargetkan dengan anggaran sebesar Rp2,873,519,807.00 kemudian terealisasi sebesar Rp3,013,150,190.00 sehingga diperoleh selisih anggaran mencapai sebesar Rp139,630,383.00. Realisasi belanja pegawai yang lebih besar daripada target anggaran yang telah ditetapkan disebabkan karena adanya perubahan jumlah pegawai tetap dan adanya penambahan biaya tunjangan-tunjangan daritahun sebelumnya.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran dana untuk belanja alat tulis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, dan sebagainya. Belanja barang dan jasa yang ditargetkan dengan anggaran sebesar Rp1,102,746,000.00 kemudian yang terealisasi sebesar Rp1,085,897,235.00 sehingga di peroleh selisih anggaran adalah sebesar Rp16,848,765.00

Berikut penjelasan pos belanja modal yaitu sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan lain-lain untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Target anggaran pada belanja modal peralatan dan mesin ditargetkan sebesar Rp44,700,000.00 kemudian yang terealisasi sebesar Rp44,700,000.00
2. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, yang termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak. Target anggaran pada belanja modal gedung dan bangunan ditargetkan sebesar 50,000,000.00 dan tidak ada target yang terealisasi pada belanja modal dan gedung.

Berdasarkan konsep *value for money* yang sudah di jelaskan pada tinjauan teori, Penulis dapat menganalisis bahwa pengukuran kinerja *value for money* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah berjalan dengan efisien. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 ini ditunjukkan penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, yang dapat dilihat dari belanja operasi dan belanja modal.

Berdasarkan data penelitian yakni Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan anggaran untuk tahun 2020 yang di peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, maka dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, maka penelitian ini diawali dengan menentukan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah itu

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil kerja. Dimana sistem ini digunakan untuk mengaitkan langsung antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil yang ditentukan dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang telah dilakukan. Anggaran yang disusun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang berdasarkan pada perencanaan kinerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada program kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan indikator yang ingin dicapai. Anggaran berbasis kinerja difokuskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pinrang. Hal ini dilakukan guna menganalisis anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Adapun hasil wawancara menyatakan penyebab anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan yaitu karena adanya keterlambatan pada pengesahaan yang memakan waktu lama. Adapun hasil dari wawancara dampak jika anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan yaitu penurunan kinerja yang berdampak pada anggaran dari berbagai aspek yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

Adapun dari hasil wawancara penyebab meningkatnya anggaran belanja karena banyaknya kebutuhan perlengkapan kantor yang harus disediakan, dan Adapun hasil dari wawancara dampak menurunnya anggaran belanja berkurangnya porsi belanja sehingga budget yang disediakan tidak harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Dan dilihat dari hasil wawancara penyebab dan dampak dari menurunnya anggaran belanja tidak ada yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja kurang baik. Jadi

anggaran berbasis kinerja dilihat dari pertumbuhan belanja sudah baik.

Dari hasil wawancara anggaran berbasis kinerja pada kegiatan surat menyurat sudah terealisasi di karenakan target kinerja yang telah dianggarkan sudah terealisasi dengan baik. Dan hasil wawancara anggaran berbasis kinerja pada kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi dengan baik.

Perencanaan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang ditekankan pada program pelayanan administrasi perkantoran. Program pelayanan administrasi perkantoran yang dimaksudkan adalah:

- 1). Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat
- 2). Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Berdasarkan hasil wawancara diatas penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada kegiatan surat menyurat dapat dikatakan baik yang dimana tingkat capaiannya sebesar 97,75% dan pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan capaiannya sebanyak 99,25% sehingga pada kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dikatakan efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran pendapatan yang terealisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang (DPMPTSP) sudah diterapkan secara efektif namun belum efisien, bisa dilihat pada tabel pos belanja yaitu belanja operasi dan belanja pegawai yang dimana realisasinya lebih tinggi daripada target yang dianggarkan, sedangkan pada tabel pos belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi tidak ada namun ada anggaran yang ditentukan sehingga surplus/defisit yang terealisasi melebihi anggaran yang telah ditentukan. Dan anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan pada kegiatan jasa surat menyurat dan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dikatakan efektif.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang untuk lebih meningkatkan efisiensi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sehingga anggaran dari setiap kegiatan dapat lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang.
2. Meningkatkan transparansi publik agar lebih dijabarkan lagi apa saja potensi-potensi yang ditimbulkan dalam masing-masing pos

pendapatan dan belanja sehingga di dapat angka yang wajar seperti yang tertera pada realisasi dan target anggaran dengan kenyataan yang ada agar program kerja dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Disarankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang untuk mempertahankan tingkat efektifitasnya berdasarkan anggaran berbasis kinerja sesuai pada kegiatan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa dan perlengkapan kantor.



LAMPIRAN 1 : WAWANCARA

Informan DA

No	Nama informasi dan jabatan	Pertanyaan	Jawaban
1	Sub bagian keuangan	1. Informasi apa saja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran?	Pada laporan realisasi anggaran biasanya disajikan pada biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya langsung itu seperti gaji karyawan sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya administrasi
		2. Apakah penyebab anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan?	Penyebab anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan yaitu ada banyak, tetapi yang sering dilaporkan hanya perencanaan yang memakan waktu lama yang menyebabkan adanya keterlambatan pada pengesahan
		3. Bagaimanakah dampaknya jika anggaran belanja tidak terealisasi secara signifikan ?	Jika anggaran belanja tidak terealisasi itu akan berdampak terhadap kinerja yang menurun
		4. Apakah penyebab meningkatnya anggaran belanja?	Salah satu penyebab meningkatnya anggaran belanja yaitu banyaknya kebutuhan kantor yang harus di penuhi
		5. Apakah dampak menurunnya anggaran belanja?	Dampak dari menurunnya anggaran belanja dikarenakan budget yang telah disediakan tidak



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PER 2020 DAN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
	PENDAPATAN - LRA			
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	725,310,000.00	699,600,000.00	####
41.1	Retribusi Izin Perikanan	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
41.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0.00	0.00	0.00
41.3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	721,710,000.00	696,000,000.00	96.44
41.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0.00	0.00	0.00
	PENDAPATAN TRANSFER - LRA			
42		0.00	0.00	0.00
42.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	0.00	0.00	0.00
42.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00
42.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00
42.4	Bantuan Keuangan - LRA	0.00	0.00	0.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
43		0.00	0.00	0.00
43.1	Pendapatan Hibah - LRA	0.00	0.00	0.00
43.2	Dana Darurat - LRA	0.00	0.00	0.00
43.3	Pendapatan Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	725,310,000.00	696,600,000.00	
	BELANJA			
51	BELANJA OPERASI	3,976,265,807.00	4,099,047,425.00	####
51.1	Belanja Pegawai	2,873,519,807.00	3,013,150,190.00	####
51.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,006,222,807.00	2,149,433,540.00	####
51.1.01.01	Gaji Pokok PNS dan Representasi	1,545,890,970.00	1,679,450,200.00	108.64
51.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130,104,148.00	141,186,592.00	108.52
51.1.01.03	Tunjangan Jabatan	219,244,125.00	209,725,000.00	95.66
51.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31,443,375.00	35,100,000.00	111.63
51.1.01.06	Tunjangan Beras	77,496,642.00	81,689,760.00	105.41
51.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,021,558.00	2,261,042.00	111.85
51.1.01.08	Pembulatan Gaji	21,989.00	20,946.00	95.26
51.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	729,744,000.00	726,284,000.00	99.53
51.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	729,744,000.00	726,284,000.00	99.53
51.1.07	Uang Lembur	8,853,000.00	8,732,650.00	98.64
51.1.07.01	Uang Lembur PNS	8,853,000.00	8,732,650.00	98.64
51.1.08	Honorarium Pegawai	128,700,000.00	128,700,000.00	####
51.1.08.01	Honorarium Pegawai	128,700,000.00	128,700,000.00	100.00
51.2	Belanja Barang dan Jasa	1,102,746,000.00	1,085,897,235.00	98.47
51.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92,834,500.00	92,802,000.00	99.96
51.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	74,535,500.00	74,503,000.00	99.96
51.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, ba	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
51.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4,999,000.00	4,999,000.00	100,00
5.1.2.01.10	Belanja Alat Kelengkapan Kantor	9,800,000.00	9,800,000.00	100,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	15,860,000.00	15,860,000.00	####
5.1.2.02.08	Belanja bahan praktek kepelatihan	15,860,000.00	15,860,000.00	100,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	76,620,000.00	72,365,564.00	94,45
5.1.2.03.01	Belanja telepon	9,480,000.00	9,394,920.00	99,10
5.1.2.03.03	Belanja listrik	32,140,000.00	27,993,644.00	87,10
5.1.2.03.12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	28,000,000.00	27,982,000.00	99,94
5.1.2.03.17	Belanja Jasa Service perlengkapan kantor	7,000,000.00	6,995,000.00	99,93
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	5,184,000.00	3,473,820.00	67,01
5.1.2.04.04	Belanja Premi asuransi ketenagakerjaan	5,184,000.00	3,473,820.00	67,01
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18,950,000.00	18,304,844.00	96,60
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,200,000.00	3,180,000.00	99,38
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,500,000.00	6,500,000.00	100,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7,000,000.00	6,985,214.00	99,79
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2,250,000.00	1,639,630.00	72,87
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85,398,600.00	85,382,900.00	99,98
5.1.2.06.01	Belanja cetak	51,626,100.00	51,620,000.00	99,99
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	33,772,500.00	33,762,900.00	99,97
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,500,000.00	7,500,000.00	####
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7,500,000.00	7,500,000.00	100,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169,159,000.00	169,125,000.00	99,98
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	129,360,000.00	129,360,000.00	100,00
5.1.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35,524,000.00	35,490,000.00	99,90
5.1.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	4,275,000.00	4,275,000.00	100,00
5.1.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36,000,000.00	36,000,000.00	####
5.1.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	18,000,000.00	18,000,000.00	100,00
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	18,000,000.00	18,000,000.00	100,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130,938,000.00	130,780,207.00	99,88
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,860,000.00	17,835,000.00	99,86
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	113,078,000.00	112,945,207.00	99,88
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	1,200,000.00	1,200,000.00	####
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	132,919,000.00	123,820,000.00	92,48
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Asistensi	2,400,000.00	2,400,000.00	100,00
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Perencanaan	29,799,000.00	19,800,000.00	66,45
5.1.2.19.08	Belanja Jasa Pemeliharaan	100,720,000.00	100,720,000.00	100,00
5.1.2.23	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60,182,900.00	60,182,900.00	####
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20,000,000.00	20,000,000.00	100,00
5.1.2.23.03	Belanja bimbingan teknis	40,182,900.00	40,182,900.00	100,00
5.1.2.28	Belanja Jasa lainnya	270,000,000.00	270,000,000.00	####
5.1.2.28.04	Belanja jasa petugas pelayanan publik	252,000,000.00	252,000,000.00	100,00
5.1.2.28.05	Belanja jasa tenaga pengemudi/sopir	6,000,000.00	6,000,000.00	100,00
5.1.2.28.06	Belanja tenaga pembersih	12,000,000.00	12,000,000.00	100,00
5.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
5.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
5.2	BELANJA MODAL	94,700,000.00	44,700,000.00	####
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,700,000.00	44,700,000.00	####
5.2.2.15	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1,500,000.00	1,500,000.00	####

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
	Jumlah Pengeluaran	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	0.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4,020,966,307.00)	(4,143,747,425.00)	

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Pangkat :
NIP :







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Abdulrahman, No. 234 Makassar 59121 Telp. (0411) 5100072, 591233, Fax (0411) 5912348

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEHAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Memerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rahma Nurhikmah

NIM : 105721126318

Program Studi : Manajemen

Dengan ini:

No	Bab	Nilai	Arifung Batas
1	Bab 1	5 %	(0 %)
2	Bab 2	6 %	(0 %)
3	Bab 3	0 %	(0 %)
4	Bab 4	0 %	(0 %)
5	Bab 5	0 %	(0 %)

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar Mengumumkan Aplikasi Tersebut

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Penerbitan

BAB I Rahma Nurhikma 105721126518



BAB II Rahma Nurhikma 105721126518

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

21%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	4%
2	es.scribd.com Internet Source	3%
3	pmptsp.pmpgkab.go.id Internet Source	3%
4	bpkptanjangkab.go.id Internet Source	3%
5	core.ac.uk Internet Source	2%
6	id.123dok.com Internet Source	2%
7	jorn.unpas.ac.id Internet Source	2%
8	reposipdusu.ac.id Internet Source	2%
9	eprints.ung.ac.id Internet Source	2%



ORIGINALITY REPORT

6%	6%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PLAGIARISM SOURCES

1	digilib.uns.ac.id	2%
2	repository.unsi.ac.id	2%
3	digilibadmi.unsi.ac.id	2%

Exclude Bibliography
Exclude Bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Rahma Nurhikma 105721126518

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



arsiptakalar.id
Internet Source

3%



repository.unmas.ac.id
Internet Source

3%



ppid.suisel.go.id
Internet Source

2%



bkd.mangkab.go.id
Internet Source

2%

Exclude quoted text

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

٢٠٢٢

Nomor : 497/05/A.2-III/01-43/2022 Makassar, 21 Maret 2022

Lamp :

Hal : Permethaan Ijin Penelitian

Kondu Vot.

Kelua LPM Universitas Muhammadiyah Makassar

Yt:

Tertu

Pengas Honor

Dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat akan diterima ini

Nama :

Alamat :

Manajemen

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran

dan Pemasaran



BIOGRAFI PENULIS



Rahma Nurhikma panggilan Rahma lahir di Pinrang pada tanggal 15 April 2000 dari pasangan suami istri Bapak Akkas dan Ibu Sunarti. Peneliti merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl.Syekh Yusuf V No 8 Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh peneliti yaitu TK Aisyah Bungi dan lulus pada tahun 2007, kemudian

melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 170 Lembang dan lulus pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 1 Lembang dan lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2018, dan tahun 2018 mulai mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen pada Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang ini. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.